

**“SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
(JENDRAL SOEHARTO)”**

MATA KULIAH : METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Dosen Pengampu :

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Pn.D



Disusun Oleh :

OLIVIA FEBRINA

(2256041052)

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Orde Baru yang menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada masa era pemerintahan Soekarno. Dalam menggantikan posisi Soekarno, kemunculan dari jendral Soeharto yang bahkan sebelumnya tidak menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 65. Melalui proses yang cukup panjang, pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan pasca peristiwa 1965. Pada periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Namun pada awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto tidaklah cukup radikal. Masa Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1968 hingga 1998.

Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini Indonesia merupakan Negara demokrasi, namun dalam perjalanan sejarah perwujudan demokrasi di Indonesia tidaklah berjalan dengan semestinya, sebagaimana sebuah Negara demokrasi. Dari awal pemerintahan Indonesai, dimana Presiden Soekarno sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan, menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin, menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik.

Pemerintahan Orde Baru merupakan tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru ialah suatu reaksi dan koneksi prinsipil terhadap praktik praktik penyelewengan yang telah terjadi dimasa lampau, yang biasanya disebut zaman Orde Lama. Pergantian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada masyarakat, mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi azas dan UUD 1945.

Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini diikuti dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, terjadinya kesenjangan sosial antara rakyat kaya dengan miskin juga semakin meluas. Melalui Surat Pemerintah Sebelas Maret (Supersemar), kemudian Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan adanya sistem politik baru yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahannya yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde Baru berencana akan merubah kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakatnya dengan berlandaskan ideal Pancasila dan UUD 1945.

Langkah awal yang dilakukan oleh Jendral Soeharto dalam kepemimpinan Orde baru adalah melalui Sidang Umum MPR 1967. Jendral Soeharto diangkat oleh MPRS mejadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamankan agar pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah pada Sidang Istimewa MPR 1967, oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa pemilu akan di selenggarakan pada tahun 1971. Maret 1968 MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru yang dikendalikan oleh Soeharto memberi peran sosial politik yang cukup besar bagi ABRI terutama Angkatan Darat. Fungsi ABRI pada masa orde bary, merupakan balance yang dinamis dalam partnership sipil ABRI. Artinya hubungan antara sipil dan ABRI harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar menciptakan dan menjaga keseimbangan dan ketetapan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Pada komando ABRI, pemerintahan Orde Bary berhasil menunjukan pada dunia mengenai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, sehingga meyakinkan negara untuk berinvestasi . Keberhasilan pemerintahan Orde Baru ini telah memperkuat keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Namun kemajuan dibidang ekonomi tersebut harus dibayar mahal dengan semakin ketatnya pengaturan mengenai hak hak politik sipil.

Sistem politik Orde Baru yang bercorak Birokratik Otoritarian menjadikan presiden bisa memegang kekuasaan penuh dalam bidang ekonomi ataupun politik. Misalnya, presiden mengangkat sisa MPR yang tidak diisi DPR, bersidang setiap lima tahun sekali memilih presiden dan menentukan GBHN, dan 100 kursi DPR disisikan bagi perwira tentara.

Setelah persiapan terakhil menjelang pelaksanaan kudeta, ditetapkan bahwa gerakan akan dimulai pada akhir kamis malam 30 September 1965. Sesuai dengan keputusan rapat terakhir 29 September 1965 di rumah Sjam, gerakan ini diberi nama "Gerakan 30 September". Untuk memberikan informasi dan instruksi serta koordinasi yang lebih baik, maka di samping mengadakan rapat rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang memegang jabatan di Jakarta tersebut, Sjam, selaku Kepala Biro Khusus PKI, berturut turut mengadakan pertemuan dengan kepala biro khusus daerah yang diselenggarakan di rumahnya.

Untuk menutupi tujuan yang sebenarnya, fitnah dilancarkan terhadap tokoh tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka mengumumkan bahwa G-30-S/PKI dilancarkan oleh perwira perwira yang "berpikiran maju". Dan menentang rencana kudeta Dewan Jendral, tetapi kedok yang dilapisi fitnah tersebut terbuka sendiri pada hari itu juga. Pada pukul 13.00 disiarkan sebuah dekrit tentang pembukaan Dewan Revolusi dan Kabinet Dwikora dinyatakan demisioner.

Pemerintahan ideal dalam kacamata Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan berusaha tampil dominan dalam usaha usaha pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya dominasi pemerintah dirasakan terlalu kuat, dalam hal ini yang berusaha dikembangkan terhadap pegawai negeri dan aparat birokrasi untuk senantiasa mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

Orde baru berencana akan mempermudah kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakatnya dengan berlandaskan idela Pancasila dan UUD1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) merupakan salah satu program besarnya yang ingin diwujudkan. Tahapan yang dijalani Orde Baru adalah merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga pancasila menjadikan budaya di masyarakat.

Ideologi Pancasila seharusnya bersumber pada cara pandang integralistik yang lebih mengutamakan gagasan serta tujuan tentang sebuah Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diperuntukkan menjadi satu satunya asas bagi suatu organisasi yang berfungsi sebagai kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya. Dapat diperjelas bahwa pada masa masa ini adalah dimana Negara dan rakyat berhadapan hadapan dan pemerintah di dalamnya sangat mendominasi. Selama rezim Orde Bary berkuasa, demokrasi

pancasila yang semula dicadangkan untuk pengertian normative dan empiric tidak pernah sejalan.

Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini Indonesia merupakan Negara demokrasi, namun dalam perjalanan sejarah perwujudan demokrasi di Indonesia tidaklah berjalan dengan semestinya, sebagaimana sebuah negara demokrasi. Dari awal pemerintahan Indonesia, dimana Presiden Soekarno sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan, menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin, menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik.

Setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno muncullah pemerintahan Orde Baru dimana Presiden Soeharto sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan. Pada awalnya Orde Baru dapat menampilkan pemerintahan yang demokrasi tetapi ternyata hal ini hanya berlangsung kira kira selama 3 tahun yakni selama pemerintah baru ini menyiapkan format politik baru melalui penyusunan UU bidang politik.

Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulanya tahapan baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan Presiden dan wakil Presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai partai lain.

Pada masa orde baru ini, pemerintahan bertekad untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem yang di terapkan adalah Demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Kepemimpinan atau kekuasaan presiden sangat besar dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, yang mengakibatkan terjadinya sentralistik kekuasaan pada presiden.

Sistem pemerintahan Presidensial telah dianut oleh Indonesia sejak masa Orde Lama sampai masa reformasi sekarang ini. Walaupun secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer, Pasca Amandemen (perubahan) Undang Undang Dasar 1945 mempertegas sistem Presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara. Secara umum,

sistem pemerintahan Negara Indonesia menganut “Sistem Presidensial” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945

Sistem pemerintahan Presidensial secara prinsipil menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara seimbang. Sistem Presidensial yang diterapkan Indonesia dapat menjadi bahasan yang menarik, dikarenakan pada umumnya Negara yang menggunakan sistem Presidensial hanya ada dua partai saja. Dimana ketika Presiden terpilih itu dari partai Demokrat maka secara otomatis partai Republik akan menjadi oposisi, begitupun sebaliknya demi terwujudnya checks and balances oleh eksekutif dan legislatif.

Demokrasi tidak terlaksana, tidak ada rotasi kekuasaan eksekutif, pembatasan rekrutmen politik, dan KKN merajalela. Kepemimpinan Soeharto banyak diwarnai dengan adanya lobi politik yang tidak sehat. Pada masa Soeharto, komunikasi antarpolitical politik yang mendudukkan wakilnya di DPR/MPR tidak lagi bisa menampung aspirasi masyarakat, kekuasaan politik Indonesia berpusat pada presiden. Badan legislative tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat, tetapi hanya mendukung presiden.

Rezim Orde Baru memiliki cara tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir tidak ada institusi politik di negara ini yang tidak berada dalam control presiden, terutama setelah Orde Baru memasuki periode Stalinist. Lembaga kepresidenan yang begitu kuat, menjadikan cabinet berada dalam posisi subordinatif, bahkan parlemen tidak berdaya menghadapi kekuasaan eksekutif, termasuk lembaga peradilan yang tidak bisa berdiri secara independen dan menjadi instrument kekuasaan enzim Orde Baru.

Pada masa orde baru ini, kekuatan politik bergeser pada bidang militer, teknokrasi dan birokrasi. Gagasan serta ide harus membutuhkan langkah yang praktis agar dapat menyeimbangkan dan keseimbangan. Dan hal ini tidak terjadi pada era dekomrasi pancasila. Buktinya masih terdapat banyak penyelewengan yang ironisnya menyamarkan arti dalam sebuah demokrasi yang sebenarnya di dalam sebuah pemerintahan. Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi di Negara karena telah terjadi berbagai penyimpangan.

Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini tidak lebih baik dari dua model pemerintahan sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari kenyataan berlawanan dengan tujuan demokrasi sendiri. Pada masa Orde Baru ini justru menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat dalam hal berbicara atau berpendapat maupun mengkritik.

Orde Baru ini tidak sejalan dengan esensi dan substansi dalam sebuah pemerintahan. Orde Baru juga dilatar belakangi oleh beberapa polemic internal negara dan berikut adalah Latar Belakang Lahirnya Orde Baru, yaitu:

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
3. Adanya TRUTURA
4. Turunya wibawa dan kekuasaan presiden Soekarno
5. Dikeluarkannya SuperSemar

Sejak berkuasa pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Usaha usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan masyarakat , bangsa dan negara. Aspek yang menjadi sorotan pembenahan Orde Baru adalah mulai membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan pembenahan Orde Baru adalah mulai membangun politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negri Indonesia lebih cenderung berkiblat pada negara negara komunis. Hal ini terlihat dari dibentuknya poros dengan negara negara komunis seperti dengan Peking, Pnom Phen, Hanoi dan Pyongyang. Oleh sebab itulah Orde Baru pada masa awal kekuasaanya berusaha merubah citra tersebut dengan melakukan pembenahan politik luar negeri dan kembali menjadi anggota PBB.

Pemerintah Orde Baru tak hanya membangun citra bidang politik saja dalam membangun kehidupan bangsa dan negara, namun juga melakukan pembangunan sektor ekonomi. Kekuatan politik Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadi pembangunan ekonomi sebagai pusat perhatian utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan jika kehidupan ekonomi semakin baik, maka akan mempermudah langkah pemerintahan Orde Baru dalam memperoleh dan memperkokoh legitimasi kekuasaan yang baru saja di cengkram serta dapat merebut simpati dari rakyat.

Kehidupan politik yang berdasarkan sistem demokrasi terpimpin, partai yang amat luas memperoleh kesempatan untuk membangun dan mengembangkan kekuatan politiknya

ialah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam kedudukan resmi sebagai wakil salah satu golongan itu PKI dapat mewujudkan rencana partainya untuk memperoleh lebih banyak posisi penting dalam mengatur kehidupan politik dan masyarakat.

Terbuka luasnya kesempatan yang demikian bagi PKI tidak terlepas dari sikap Presiden Soekarno terhadap partai yang berideologi Marxisme – Komunisme ini. Sikap presiden Soekarno terhadap PKI pada masa demokrasi terpimpin itu terutama beralasan “ bahwa di dalam segala hal, apa yang di lakukan oleh PKI dapat beliau kendalikan”.

Didalam perkembangannya kemudian ternyata PKI telah mempersiapkan suatu gerakan perebutan kekuasaan sambil melontarkan berbagai isu untuk menciptakan situasi yang membuka jalan bagi mereka untuk merebut kekuasaan. Keresahan di dalam masyarakat makin berkembang, seiring dengan terciptanya pertentangan yang makin meruncing di antara golongan yang satu dengan yang lainnya.

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah menjadi bagian masa lalu, bagian dari perjalanan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita cita Proklamasi tahun 1945. Seperti pula momentum sebelumnya, reformasi adalah bagian sejarah dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sejak awal gerakan reformasi telah dimaknai berbeda beda antara lain mencakup desain negara ideal, slogan klise ataupun sebatas ekspresi pikiran seseorang. Ada yang berpendapat bahwa reformasi tidak identic dengan pergantian individu melainkan berkaitan dengan sistem dan struktur.

Reformasi sebagai gerakan politik telah membuat Soeharto mundur dan sukses menempatkan Soeharto sebagai a divice that unifies all those who share the same enemy. Banyak pihak yang menyatakannya sebagai gerakan yang gagal membawa perubahan yang lebih baik sebagaimana dijanjikan. Gerakan ini dapat disterilkan dari aktor aktor portunis yang semata mata hanya menginginkan posisi sebagai akibat perubahan konfigurasi struktur sosial, ekonomi dan politik baik yang berasal dari aktor lama ataupun yang amatiran yang akan mempengaruhi corak jalannya reformasi itu sendiri.

Perjuangan reformasi itu sendiri sering dipahami dalam konstelasi kekuasaan yang sentralistik, pengaruh kekuatan ekonomi global dan isu isu hak asasi manusia (HAM), pemerintahan yang bersih, masyarakat mandani, persoalan korupsi, kolusi, nepotisme, dan

krooni. Reformasi sering dibicarakan dalam bingkai kehidupan politik dan sosial ekonomi sebagai bentuk koreksi dan sekaligus perlawanan terhadap enzim Orde Baru.

Reformasi memicu terjadinya kontestasi kepentingan yang luas. Situasi itu menunjukkan upaya berbagai pihak untuk meyakinkan gagasan reformasi perlu dilakukan. Menuntut pergantian kekuasaan itu sendiri. Seseorang bisa mendapat predikat sebagai reformis atau status quo. Reformasi ini telah memunculkan perdebatan dan argument yang memicu suatu kontroversi dan kisah besar dalam sejarah kekuasaan di Indonesia yang mempertanyakan tentang fakta, nilai dan kebijakan.

Aspek bahasa di dalam gerakan reformasi adalah sesuatu yang penting karena ia merupakan the art of delivery sehingga tampak siapa siapa yang berbicara manis kemudian pahit, siapa yang berbicara pahit kemudian manis. Karakter karakter ini mengungkapkan tindakan tindakan utama di dalam cara yang berbeda beda yang menunjukkan motif motif kepentingan yang berbeda. Isu muncul melalui peristiwa peristiwa. Definisi isu adalah produk yang timbul dari orientasi utama atas perkembangan kejadian yang ada. Isu tergantung pada bagaimana dan seberapa abstrak prinsip prinsip yang ada, seberapa kompleks konflik yang muncul atau kondisi kondisi yang berkelanjutan yang mengkristal menjadi peristiwa yang bernilai.

Transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan semakin mudarnya pemerintahan yang bertumpu pada charisma Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin. Prioritas utama setelah bangsa Indonesia merdeka adalah melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, revolusi dianggap baru mulai. Dalam keyakinan itu, ia berusaha mendapatkan pengaruh politik yang lebih luas untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama yang membawa bentuk pelaksanaan pemerintahan yang kuat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul “Sistem pemerintahan indonesia pada masa orde baru” maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak peralihan pemerintah dari masa orde lama ke orde baru?
2. Mengapa pemerintahan orde baru memberikan peran yang cukup penting pada sekelompok ABRI?

1.3 Manfaat dan Tujuan

Manfaat dan tujuan penelitian adalah :

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan daya berfikir yang logis, kritis dan analis.
2. Sebagai sarana efektif untuk mengaplikasikan metologi penelitian sejarah.
3. Meningkatkan disiplin dalam bidang sejarah.
4. Melatih daya analisis dalam penulisan karya sejarah dan peka terhadap peristiwa pada masa lampau yang dijadikan bahan untuk melangkah ke masa depan.

1.4 Sumber Referensi

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.

Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.

Gonggong, A., Leirissa, R. Z., Djamhari, S. A., Zuhdi, S., Ghazali, Z., Iskandar, M., & Sutjiatiningsih, S. (1993). Sejarah nasional indonesia vii lahir dan berkembangnya orde baru.

Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.

Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas.

Yogatama, R. D., Ramadhani, D., & Gunawan, R. P. T. (2017). Dinamika Politik dan Hubungan Internasional Indonesia di Masa Orde Baru.

